

TESIS
PENGATURAN ANGGARAN NEGARA UNTUK BANTUAN
KEUANGAN PARTAI POLITIK

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum*

Oleh :

AHMAD ‘ADIYAAT ALQARNI
NIM.2220112044



Pembimbing :

Dr. Syofiarti, S.H., M.H

Dr. Hengki Andora, S.H., LL.M

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2025

PENGATURAN ANGGARAN NEGARA UNTUK BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

(Ahmad ‘Adiyaat Alqarni, 2220112044, Magister Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Andalas, 162 halaman, tahun 2025)

ABSTRAK

Pengaturan keuangan partai politik merupakan aspek krusial dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam sistem politik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi yang mengatur sumber dan penggunaan dana partai politik di Indonesia, serta mengidentifikasi tantangan dalam pengawasan keuangan partai politik. Penelitian ini membahas tiga rumusan masalah, *pertama* Bagaimana pengaturan bantuan keuangan terhadap partai politik Indonesia. *Kedua* Bagaimana perbandingan bantuan keuangan partai politik di negara Asia Tenggara yang menganut sistem presidensial dan parlmenter. *Ketiga* Bagaimana seharusnya bantuan keuangan partai politik di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan data sekunder sebagai bahan hukum utama dan dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Partai politik berperan sebagai organisasi yang dapat menempatkan politisi dalam pemerintahan dan juga menjalankan perannya dalam pendidikan politik. Dalam pelaksanaannya, partai politik membutuhkan dukungan finansial yang besar agar berhasil melaksanakan kegiatannya sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana partai politik merupakan elemen yang sangat penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik. Dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan partai politik dibutuhkan pengaturan tentang keuangan partai politik yang ideal. Pembaharuan pengaturan bantuan keuangan partai politik dapat diwujudkan jika Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi sumber tunggal keuangan partai politik. Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai sumber tunggal pendanaan partai politik di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana partai politik. Dengan pendanaan yang sepenuhnya berasal dari APBN, diharapkan partai politik tidak lagi bergantung pada sumbangan pribadi yang sulit diawasi. Adapun penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengawasan keuangan partai politik memiliki implikasi yang signifikan. Dengan penerapan asas ini, partai politik diharuskan untuk transparan dan bertanggung jawab dalam pengelolaan dana mereka. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik terhadap partai politik, tetapi juga mencegah penyalahgunaan dana dan praktik korupsi.

Kata Kunci : Partai Politik, Keuangan, Pengawasan.

ALLOCATION OF STATE BUDGET FOR FINANCIAL ASSISTANCE TO POLITICAL PARTIES

(Ahmad 'Adiyaat Alqarni, 2220112044, , Master of Law, Faculty of Law, Andalas
University, 162 pages, 2025)

ABSTRACT

The regulation of political party finances is a crucial aspect in maintaining transparency and accountability within the political system. This study aims to analyze the regulations governing the sources and use of political party funds in Indonesia, as well as identify challenges in the oversight of political party finances. The study addresses three main issues: first, how financial assistance to political parties in Indonesia is regulated; second, how does the financial assistance of political parties compare in Southeast Asian countries that adhere to the presidential and parliamentary systems. Third, how should the financial assistance of political parties in Indonesia be. This research employs a normative method with secondary data as the primary legal material, analyzed qualitatively. The findings indicate that political parties play a role as organizations that can place politicians in government and also carry out their role in political education. In their implementation, political parties require substantial financial support to successfully carry out their activities as mandated by law. Transparency and accountability in the management of political party funds are essential elements to maintain integrity and public trust. In order to realize transparency and accountability in political party finances, ideal political party finance regulations are needed. Reform of the regulation of political party financial assistance can be realized if the State Revenue and Expenditure Budget (APBN) becomes the sole source of political party finances. The use of the State Revenue and Expenditure Budget (APBN) as the sole source of political party funding in Indonesia aims to increase transparency and accountability in the management of political party funds. With funding coming entirely from the APBN, it is hoped that political parties will no longer depend on private donations which are difficult to monitor. The application of the principle of accountability in monitoring political party finances has significant implications. By implementing this principle, political parties are required to be transparent and responsible in managing their funds. This not only increases public trust in political parties, but also prevents misuse of funds and corrupt practices.

Keywords: Political Parties, Finance, Oversight.